

Implikasi yuridis pengambilalihan perseroan terbatas terhadap hak-hak pekerja menurut pasal 163(2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan studi kasus perkara PT BPR Prima Nusantara v para pekerja = The legal implication of company acquisition on the labor rights in article 163 paragraph 2 of law number 13 year 2003 regarding employment case study of PT BPR Prima Nusantara v labors

Melisa Eveline, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20388977&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Pengambilalihan merupakan upaya untuk melakukan penyehatan perbankan, namun upaya tersebut berdampak pada hak-hak pekerja. Hal ini terbukti dalam pengambilalihan PT BPR Prima Nusantara yang tidak memberikan hak-hak pekerjanya yang mengundurkan diri akibat pengambilalihan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang persyaratan, prosedur dan mekanisme pengambilalihan. Sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai dampak pengambilalihan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebatas mengenai perjanjian kerja bersama dan status hubungan kerja. Sikap pengadilan dalam kasus ini telah melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

**ABSTRACT**

Acquisition is an attempt to resuscitate a company, but it can damage workers' rights if the company doesn't give workers what is theirs as the law stated. Like in PT. BPR Prima Nusantara case, workers who resigned didn't received any compensation as they should by the law. This thesis used a normative juridical approach and case study methods. From research result it's found that Bill No. 40 Year 2007 regarding Limited Company controls requirements, procedures, and Acquisition mechanism. Bill No. 13 Year 2003 regarding Employment on the other hand controls acquisition effect toward workers/laborers limited to Collective Bargaining Agreement (CBA) and employment status. In PT BPR Prima Nusantara case, Court's has protected the employees' rights.